

SKRIPSI

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN KREDIT INVESTASI DI KAWASAN
METROPOLITAN MAMMINASATA
(MAROS, MAKASSAR, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR)
PERIODE 2000 - 2011.**

Disusun dan diajukan oleh

RUSMAN

A11109304



Kepada :

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN KREDIT INVESTASI DI KAWASAN
METROPOLITAN MAMMINASATA
(MAROS, MAKASSAR, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR)
PERIODE 2000 - 2011.**

Disusun dan diajukan oleh

**RUSMAN
A11109304**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

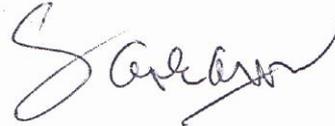
Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, SE. MA
NIP. 19630404 198702 1 002

Pembimbing II



Dr. Muh. Syarkawi Rauf, SE., ME.
NIP. 19740109 200212 1 001

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, SE., MA
NIP. 19630625 198703 2 001

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT INVESTASI DI KAWASAN METROPOLITAN MAMMINASATA (MAROS, MAKASSAR, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR) PERIODE 2000 - 2011.

Disusun dan diajukan oleh

RUSMAN
A11109304

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **27 Juli 2013** Dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, SE.MA	Ketua	1. 
2. Dr. Muh. Syarkawi Rauf, SE. MSE	Sekretaris	2. 
3. Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si	Anggota	3. 
4. Suharwan Hamzah, SE. M.Si	Anggota	4. 
5. Muh. Agung Ady M, SE. M.Si	Anggota	5. 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, SE., MA
NIP. 19630625 198703 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

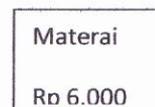
Nama : Rusman
NIM : A 111 09 304
Jurusan/program studi : Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAAN
KREDIT INVESTASI DI KAWASAN METROPOLITAN MAMMINASATA
(MAROS,MAKASSAR, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR)
PERIODE 2000 - 2011.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 21 Agustus 2013
Yang membuat pernyataan



R u s m a n

ABSTRACT

An Analisis Of The Influence Factors of Credit Investment Demand In The Mamminasata Metropolitan Area (Maros, Makassar, Sungguminasa, And Takalar) at Period 2000-2011, Rusman. (led by Muhammad Yunus and Muhammad Syarkawi Rauf).

The high demand for loans becomes an indicator that the economy is experiencing good growth. It means that the role of the banking sector through lending has an important role to support the acceleration of development in the area.

Investment loan is one variant of the financing of banking products which have a strategic role to promote economic growth in every region.

This study aims to analisis the factors that effect demand for investment credit in Mamminasata Metropolitan region during the period 2000-2011. This study used panel data regression analisis with the model Pooled Least Square (PLS). This use aims to analisis the influence of PDRB (X1), interest rate (x2), and inflation rate (x3) for invesment credit demand (Y) in the region.

The result of analisis using PLS method is known that the PDRB variable has positive and significant effect. Meanwhile, each variable interest rate and the iflation rate negatively but not significantly effect the demand for invesment credit in Mamminasata Metropolitan region fot the period 2000-2011.

Keyword : *Demand Loan Investment, PDRB, Interest Rate, Inflation and Pooled Least Square (PLS).*

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi di Kawasan Metropolitan Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa, dan Takalar) Periode Tahun 2000-2011, Rusman. (dibimbing oleh Muhammad Yunus dan Muhammad Syarkawi Rauf).

Tingginya permintaan kredit perbankan menjadi sebuah indikator bahwa suatu perekonomian sedang mengalami perkembangan yang baik. Hal ini berarti peran sektor perbankan melalui penyaluran kredit, memiliki peran penting untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut.

Kredit investasi merupakan salah satu varian produk perbankan dari sisi pembiayaan yang memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit investasi di kawasan Metropolitan Mamminasata selama periode tahun 2000-2011. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel dengan model *Pooled Least Square (PLS)*. Penggunaan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB (X1), tingkat suku bunga (X2) dan laju inflasi (X3) terhadap permintaan kredit investasi di kawasan tersebut (Y).

Hasil analisis dengan menggunakan metode PLS diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, masing-masing variabel tingkat suku bunga dan laju inflasi berpengaruh negatif namun tidak cukup signifikan mempengaruhi permintaan kredit investasi di kawasan Metropolitan Mamminasata untuk periode tahun 2000-2011.

Kata kunci: Permintaan Kredit Investasi, PDRB, Suku Bunga, Laju Inflasi dan *Pooled Least Square (PLS)*.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah tuhan semesta sekalian alam, yang menciptakan dari segala ketiadaan, bagi-Nya adalah segala kesempurnaan, karena limpahan rahmat dan karunia dari-Nya jualan, skripsi dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi di Kawasan Meteropolitan Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa, dan Takalar) Untuk Periode Tahun 2000-2011**, dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari cukup, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik membangun, untuk nantinya bisa dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Penulis juga menyadari, bahwa lahirnya karya tulis ini tidak lepas dari adanya dukungan dari banyak pihak yang telah sangat membantu terselesaikannya karya tulis ini. Baik secara langsung maupun tidak, sejumlah nama yang telah memberikan dukungan dengan segala bentuknya itu, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. DR. Hj. Rahmatia, MA selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
2. Ayahanda bapak Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan karya tulis ini, telah memberikan masukan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis.
3. Bapak Dr. Muh. Syarkawi Rauf, SE.ME selaku dosen pembimbing kedua, yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan kepada penulis sehingga tugas penting ini bisa terselesaikan pada waktu yang tepat.
4. Bapak ibu dosen jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan didiknya selama penulis belajar di Fakultas ini.
5. Segenap staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Pak Masse, Pak Parman, Ibu Sari Wulan, Pak Safar dan banyak lagi yang

lain, yang telah setulus hati memberikan pelayanan akademik kepada penulis selama berada di Fakultas ini.

6. Kedua orang tuaku, yang tak henti-hentinya memberikan dorongan semangat dan pesan-pesan moral, sehingga tibalah penulis pada masa akhir studi di fakultas tercinta ini.
7. Kawan sejawat mahasiswa, kawan-kawan dari pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis untuk terus belajar dan mengabdikan untuk kepentingan orang banyak. Adalah Zar, Anas, Mamet, Fany, Rara, Jusma, Cha-cha, Uya dan masih banyak lagi yang lain belum disebutkan dalam halaman ini.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan peranananya selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Unhas, baik secara langsung maupun tidak, telah memberikan bantuan yang sangat berharga, terimakasih dan salam hormatku untuk kalian semua.

Terakhir, besar harapan saya agar karya tulis sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, dan tidak hanya menjadi "pajangan" dikala tidak dibutuhkan, oleh karena itu masukan dan saran dari segenap sidang pembaca sangat dibutuhkan, untuk penyempurnaan.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
<i>Abstrack</i>	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Teori Dasar	12
2.1.1 Perdebatan Teori Permintaan Uang & Permintaan Kredit Investasi	14
2.1.2 Perdebatan Teori Investasi & Permintaan Kredit Investasi	16
2.1.3. Perdebatan Konsep PDRB & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi	17
2.1.4. Perdebatan Konsep Tingkat Suku Bunga & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi	22

	2.1.5. Perdebatan Konsep Laju Inflasi & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi	
26		
	2.2. Studi Empiris	
30		
	2.3. Kerangka Pikir.....	34
	2.4. Hipotesis	35
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
	3.1. Jenis dan Sumber Data	36
	3.2. Metode Analisis	36
	3.2.1 Analisis Regresi Dengan Data Panel	
36		
	3.2.2 Koefisien Determinasi	
39		
	3.3. Definisi Operasional Variabel	
40		
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
41		
	4.1 Gambaran Umum Kawasan Mamminasata	
41		
	4.1.1 Kabupaten Maros	
41		
	4.1.2 Kota Makassar	
46		
	4.1.3 Kabupaten Gowa	
51		
	4.1.4 Kabupaten Takalar	
56		
	4.2 Pembahasan	
60		
	4.2.1 Perkembangan Permintaan Kredit Investasi	

	di Kawasan Mamminasata	60
4.4.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB di Kawasan Mamminasata	63
4.2.3	Perkembangan Tingkat Suku Bunga di Kawasan Mamminasata	66
4.2.4	Perkembangan Laju Inflasi di Kawasan Mamminasata .	68
4.3	Analisis Data	70
4.3.1	Intrepretasi Model dan Pembahasan	71
4.3.2	Pengujian Statistik	78
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	83
4.3.4	Koefisien Determinasi	88
BAB V	PENUTUP	89
	5.1 Kesimpulan	89
	5.2 Saran	90
	5.3 Kelemahan	91
	Lampiran-lampiran	

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2007-2011.....	43
Tabel 1.2	Pertumbuhan EKonomi Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Maros Tahun 2007-2011.....	44
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2008-2011.....	45

Tabe. 1.4 PDRB atas dasar harga konstan 2000 dan pertumbuhan ekonomi kota Makassar tahun 2000-2009.	48
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar tahun 2008-2011	49
Tabel 1.6 PDRB Kabupaten Gowa 2005-2010 dan 2006-2011	53
Tabel 1.7 PDRB menurut sektor Ekonomi kabupaten Takalar atas dasar harga konstan 2000 tahun 2006-2008	58
Tabel 1.8 Penduduk kabupaten Takalar dirinci menurut kecamatan tahun 2006-2009	59
Tabel 1.9 Permintaan Kredit Investasi di Kawasan Metropolitan Mamminasata tahun 2000-2011	61
Tabel 1.10 Produk Domestik Regional Bruto Tahun dasar 2000 di Kawasan Mamminasata tahun 2000-2011	64
Tabel 1.11 Perkembangan Tingkat suku bunga kredit Investasi di Kawasan Mamminasata tahun 2000-2011.....	67
Tabel 1.12 Perkembangan laju Inflasi di Kawasan Mamminasata tahun 2000-2011	68
Tabel 1.13 Output Pengolahan Regresi Panel data dengan Permintaan Kredit Investasi sebagai Varibel Dependent di kawasan Mamminasata tahun 2000-2011	70
Tabel 1.14 Hasil F Hitung Dengan Eviews 5.0	78
Tabel 1.15 Nilai T_{hitung} Tiap Variabel	79
Tabel 1.16 Nilai Koefisien Korelasi Dengan Eviews 5.0	84

Tabel 1.17 Kriteria Pengujian Autokorelasi	86
--------------------------------------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Statistik Perkembangan Kredit Investasi Kawasan Mamminasata	4
Gambar 1.2 Statistik Perkembangan PDRB di kawasan Mamminasata	5
Gambar 1.3 Alur Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.1 Uji F- Statistik	79
Gambar 4.2 Uji t-Statistik Terhadap PDRB (X1)	80
Gambar 4.3 Uji t-Statistik Terhadap Suku Bunga (X2)	81
Gambar 4.4 Uji t-Statistik Terhadap Inflasi (X3)	82
Gambar 4.5 Output Uji Normalitas Data Menggunakan Software SPSS 16.0	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan berperan sebagai urat nadi perekonomian nasional. Hal ini dapat diamati pada saat krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia, dimana krisis telah menyebabkan krisis ekonomi yang lebih luas. Peran dunia usaha kurang berkembang yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Indonesia mengalami resesi yang nyaris tidak dapat dilakukan *recovery*.

Peran strategis sektor perbankan diperkuat oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum perbankan bekerja sebagaimana bisnis pada sebuah perusahaan yang beroperasi untuk memperoleh profit dengan berbagai produk dan jasa yang dimilikinya. Hal ini membuat semua bank komersial saling berkompetisi dalam memperebutkan pangsa pasar dari berbagai segmentasi dan kalangan.

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dengan yang membutuhkan dana (*deficit*), baik itu untuk tujuan konsumsi, investasi dan modal kerja. Selain itu juga, bank sebagai badan usaha yang memberikan jasa pada penyimpanan uang, jasa transfer serta permintaan dan penawaran kredit. Fungsi utama bank adalah lembaga intermediasi keuangan (*financial Intermediate*), baik itu pada bank konvensional maupun bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah.

Ekonomi suatu negara atau daerah sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi riil dari sektor perbankan. Hal ini disebabkan oleh semua jenis transaksi keuangan baik itu berupa barang ataupun jasa, untuk tujuan konsumsi, distribusi dan produksi bersentuhan langsung dengan perbankan, sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi perbankan dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara atau daerah, sama seperti eksistensi jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia.

Sejarah membuktikan ketika sektor perbankan mengalami pailit pada saat krisis ekonomi tahun 1997–1998, kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan menurun. Hal ini disebabkan angka kredit macet (NPL) yang tinggi, terjadinya penarikan dana secara besar-besaran di sektor perbankan (*rush*), produktivitas menurun dan perekonomian nasional mengalami depresi dengan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif (Abimanyu: 2008).

Tujuan kebijakan ekonomi, hanya bisa dicapai dengan terlebih dahulu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi tujuan diatas yaitu: (1) penyediaan lapangan kerja dan (2) harga-harga yang relatif stabil atau tidak berfluktuasi (*inflasi*). Khususnya untuk region ekonomi wilayah, pendekatannya dapat diamati pada perkembangan PDRB sebagai ukuran yang relevan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah.

Sejalan dengan itu, berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh para pengambil kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara atau daerah. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga

didukung oleh dokumen perencanaan terkini dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Semua dokumen perencanaan tersebut ditujukan semata-mata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level tertinggi yang mampu dicapai berdasarkan skala ekonomi yang dimiliki negara atau daerah. Budiono (2001) mengungkapkan bahwa Idealnya jika pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai target, maka secara simultan akan mengangkat level kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

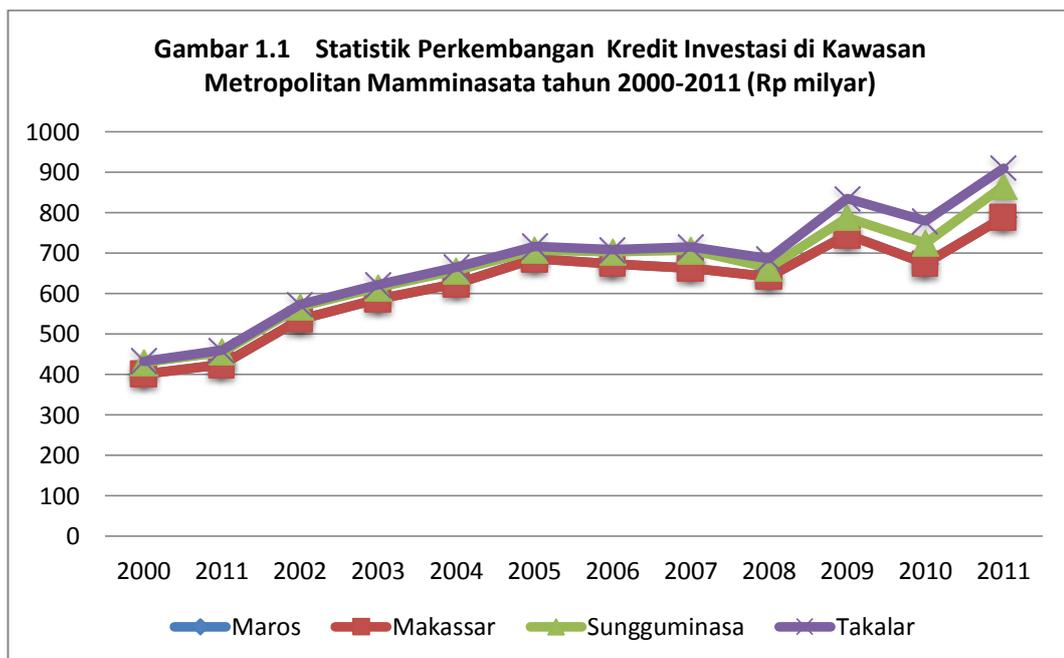
Bank berperan strategis dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana bank mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengambil kredit melalui mekanisme penentuan tingkat suku bunga. Tingkat bunga kemudian menentukan besarnya biaya modal bagi perusahaan, sehingga besarnya tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap tingginya permintaan kredit pada suatu daerah. Sejalan dengan hal itu, Sagir (2008) mengungkapkan bahwa penyaluran kredit berperan untuk membantu masyarakat dalam melakukan investasi, distribusi dengan konsumsi barang dan jasa, mengingat semua investasi, distribusi dan konsumsi berkaitan dengan uang maka akan berdampak terhadap kelancaran kegiatan pembangunan dan roda perekonomian.

Secara umum, permintaan kredit perbankan sangat ditentukan oleh perkembangan perekonomian di suatu daerah yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), suku bunga riil, dan laju inflasi. Rifai (2007) menemukan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit bank pada bank umum, Provinsi Jawa Tengah yang menemukan pengaruh yang signifikan antara PDRB, suku bunga riil dan laju inflasi dengan permintaan kredit perbankan.

Fakta-fakta di atas memberikan kesimpulan bahwa fungsi dan peran sektor perbankan dalam hal ini bank komersial (*commercial bank*) sangat penting

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Alasannya, kurang lebih 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) dikelola oleh bank, yang terdiri dari Bank Umum, BPR dan bank yang menjalankan model operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Bank Indonesia: 2011).

Sektor perbankan sebagai sektor ekonomi strategis karena berperan penting untuk mendukung kebutuhan pembiayaan di sektor riil pada kawasan metropolitan Mamminasata. Berikut ini data yang menunjukkan perkembangan permintaan kredit investasi di kawasan metropolitan Maminasata selama periode tahun 2000-2011 :

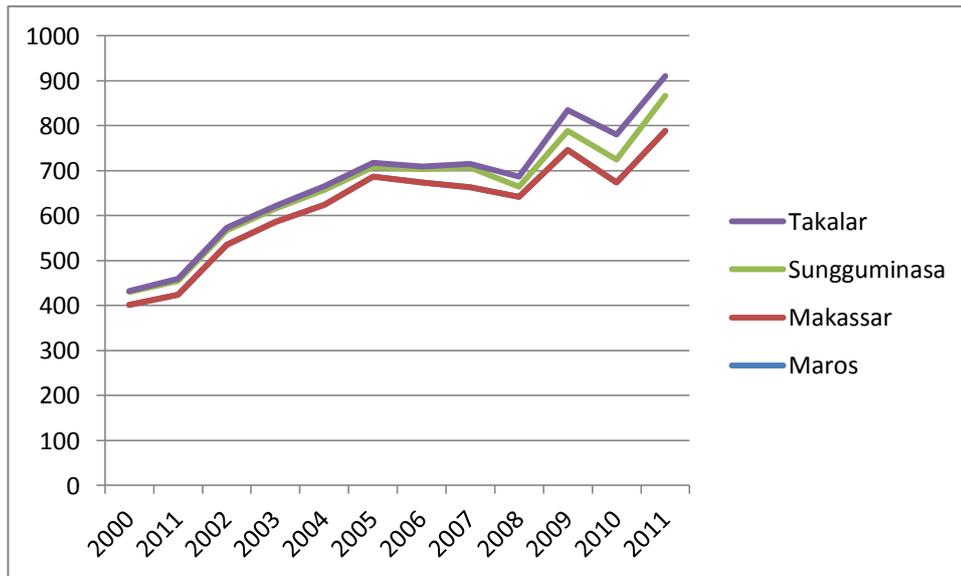


Sumber : Bank Indonesia Makassar (data diolah).

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa, selama kurun waktu tahun 2000-2011 penyaluran kredit investasi di kawasan metropolitan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dari sisi permintaan, maupun dari sisi penghimpunan dana. Hal ini disebabkan karena adanya efek timbal balik dari pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Sementara itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari laju pertumbuhan PDRB di kawasan tersebut, dapat diamati dari data berikut :

Gambar 1.2 Statistik Perkembangan PDRB di kawasan metropolitan Mamminasata periode tahun 2000-2011.(Rp Triliun)



Gambar 1.2 diatas, menunjukkan adanya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama kurung waktu tahun 2000 hingga tahun 2011. Hal ini merupakan kontribusi positif dari adanya peningkatan dalam penyaluran kredit untuk tujuan investasi di kawasan tersebut.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan. Hal ini karena secara nasional KSN berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah di dalamnya yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Di dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan 76 KSN yang memiliki kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan.

Hingga saat ini, telah ditetapkan 4 (empat) Perpres RTR KSN Perkotaan yaitu RTR Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008), Sarbagita (Perpres 45/2011), Mamminasata (Perpres 55/2011) dan Mebidangro (Perpres 62/2011). Masing-masing KSN tersebut memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Dengan demikian kebijakan dan program yang spesifik diperlukan agar tujuan rencana tata ruang KSN tersebut berhasil. Namun di antara empat KSN tersebut, hanya Jabodetabekpunjur yang sudah sering diulas. Pada kesempatan ini akan membahas permasalahan Kawasan Strategis Nasional yaitu Mamminasata,

Kawasan perkotaan Mamminasata yang meliputi kota Makassar, kabupaten Maros, Gowa dan Takalar dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dengan luas wilayah 246.230 ha. Kawasan perkotaan Mamminasata merupakan kawasan pengembangan yang terbentuk akibat pengembangan kota Makassar yang begitu pesat dan menyebabkan terjadinya aglomerasi antara tiga kota utama lainnya. Secara umum, kota Makassar mendominasi semua kegiatan perkotaan di kawasan perkotaan Mamminasata. Maka kota Makassar, yang saat ini juga berkembang sebagai pintu gerbang bagi pembangunan Indonesia di Kawasan Timur, adalah representasi dari kawasan perkotaan Mamminasata.

Di dalam sistem perkotaan nasional, Makassar sebagai kota utama dalam lingkup kawasan perkotaan Mamminasata berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini berarti cakupan pelayanan Makassar menjangkau wilayah nasional dan berfungsi sebagai pusat pelayanan produksi, distribusi dan jasa, serta berfungsi sebagai simpul transportasi untuk melayani wilayah nasional atau beberapa propinsi (PP No. 55 tahun 2011).

Namun bersamaan dengan pesatnya perkembangan kota Makassar,

tumbuh pula berbagai persoalan pada kawasan perkotaan Mamminasata, antara lain lingkungan, transportasi, kelangkaan sarana dan prasarana permukiman, sosial dan ekonomi. Persoalan tersebut saling berkaitan erat dan tidak terbatas oleh batas administrasi, jadi tidak bisa dilihat sebagai persoalan individu kota, melainkan sistem perkotaan yang terpadu.

Dalam pengembangan kawasan metropolitan Mamminasata terdapat empat isu strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu pengembangan ekonomi (investasi) dan keseimbangan antar wilayah, pengembangan kawasan metropolitan Mamminasata dalam kerangka pengembangan pulau Sulawesi, keterkaitan kawasan perkotaan Mamminasata dengan kawasan produksi di Sulsel dan Sulbar, dan penyelesaian persoalan internal perkotaan di kawasan perkotaan Mamminasata.

Semua isu tersebut dipandang strategis karena menentukan tercapainya visi Kawasan perkotaan Mamminasata yaitu terwujudnya kawasan perkotaan Mamminasata dengan program perkotaan yang hijau, nyaman, indah dan sehat yang juga mampu mendatangkan investor serta dapat disejajarkan dengan kota metropolitan di dunia sebagai kawasan metropolitan terkemuka dan terdepan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berwawasan internasional dan bersendikan kearifan lokal. Penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata yang tertuang dalam Perpres No. 55 tahun 2011 harus mendukung terwujudnya visi ini. Untuk itu, penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata diselenggarakan untuk menuju tujuannya.

Tujuan yang *pertama* adalah mewujudkan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia; *kedua*, menciptakan keterpaduan penyelenggaraan

penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata. *ketiga*; membangun sistem perkotaan kawasan perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya, *keempat*, menjaga keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada kawasan perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, *dan yang terakhir* adalah mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di kawasan perkotaan Mamminasata.

Hal-hal tersebut di atas kemudian diuraikan di dalam penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata dengan kebijakan-kebijakan lebih detail, yang meliputi:

1. Pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan,
2. Pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia,
3. Pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, dan
4. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan. (PP No. 55 Tahun 2011)

Penerapan otonomi daerah yang luas, saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah didasarkan

pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kondisi seperti itu, terdapat peluang untuk masing-masing pemerintah daerah di kawasan Mamminasata untuk melakukan kolaborasi dan sinergi antara kabupaten Kota melalui penyusunan sejumlah kesepakatan dan regulasi secara bersama-sama.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, sektor perbankan memegang peranan penting untuk penyediaan berbagai kebutuhan pembiayaan di daerah tersebut.

Pertumbuhan penduduk Kawasan Mamminasata diperkirakan tumbuh dari 2,25 juta jiwa menjadi 2,88 juta jiwa pada tahun 2020. Hal ini memberikan implikasi yang kompleks terhadap kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan. Dengan volume penerbangan 48 kali sehari, menjadikan Kota Makassar sebagai pintu gerbang pada wilayah-wilayah Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar, sehingga secara ekonomis dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan bagi wilayah disekitarnya melalui dukungan pembangunan Infrastruktur di bidang jalan & jembatan, Irigasi, Jaringan air bersih di wilayah Mamminasata, yang telah didesain melalui studi yang dilaksanakan atas kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

Sebagai kawasan strategis nasional, untuk mencapai target-target pembangunan yang telah dicanakan dengan terbitnya PP No. 55 tahun 2011 untuk kawasan Mamminasata, sangat dibutuhkan dukungan yang signifikan dari adanya sektor perbankan, mengingat fungsi intermediasi yang dimiliki oleh perbankan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pembiayaan pembangunan di kawasan tersebut. Tingginya permintaan kredit investasi di kawasan Mamminasata, merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan di kawasan

tersebut. Telah diuraian diawal bahwa, jika sektor perbankan dapat berperan maksimal untuk mendorong meningkatnya angka investasi, implikasinya adalah terjadi pertumbuhan ekonomi (PDRB) khususnya di kawasan metropolitan Mamminasata yang mencakup kabupaten Maros, kota Makassar, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar, yang juga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.

Rifai (2007) dalam penelitiannya menemukan fakta, bahwa PDRB berhubungan erat dengan permintaan kredit, disebabkan karena dengan adanya kenaikan PDRB maka tingkat konsumsi masyarakat akan semakin meningkat. Oleh sebab itu jika PDRB meningkat maka permintaan akan kredit juga akan mengalami peningkatan guna mencukupi tingkat konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat pengaruh PDRB, tingkat suku bunga, laju inflasi terhadap permintaan kredit investasi di kawasan metropolitan Mamminasata periode 2000-2011.

1.2. Masalah Pokok

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Apakah PDRB, suku bunga kredit investasi dan inflasi berpengaruh terhadap permintaan kredit Investasi di kawasan metropolitan Mamminasata periode tahun 2000-2011.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh PDRB, tingkat suku bunga, dan laju inflasi terhadap permintaan kredit investasi di kawasan metropolitan Mamminasata periode tahun 2000-2011.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan harapan tujuan penelitian tercapai, maka selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi konkrit untuk pihak pemerintah daerah di kawasan Mamminasata, khususnya terkait desain kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kredit.
2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit di kawasan metropolitan Mamminasata.
3. Sebagai bahan evaluasi akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan ilmu ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis Unhas Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Bentuk investasi yang dimaksudkan adalah penempatan selisih antara pendapatan dan konsumsi seseorang, yang selanjutnya ditempatkan pada berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito dan giro (Supryono: 2011).

Sejalan dengan hal itu, Todaro (2000) mengemukakan bahwa akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal atau Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi produktif bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang ekonomi dan sosial berupa pembangunan infrastruktur dan *social capital*. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi jalan, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi serta pembangunan fasilitas komunikasi.

Pemerintah daerah tentunya tidak akan membiarkan dinamika pertumbuhan ekonomi pasar terlalu bebas bekerja di wilayahnya, dimana variable-variabel ekonomi makro menjadi sulit terkendali. Pemerintah daerah akan terus bertindak secara aktif untuk meraih dan menarik modal ke wilayahnya dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap. Segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak lain untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi, yang tercermin melalui PDRB (Adisasmita: 2007).

Dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan pengeluaran untuk mengukur besarnya PDRB sebagai variabel independen dalam model analisis nantinya. Secara teknis, ada tiga pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yaitu (a) pendekatan hasil produksi atau *product approach*, (b) pendekatan pendapatan atau *income approach*, dan (c) pendekatan pengeluaran atau *expenditure approach*. Namun demikian, seringkali dalam menilai keberhasilan kinerja ekonomi suatu Negara atau daerah, pendekatan pengeluaran lebih sering digunakan sebagai alat ukur PDRB. (Budiono:1981).

Dalam sistem perekonomian, perbankan memegang peranan penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Triandaru: 2006). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah (PDRB), merupakan efek timbal balik dari ketersediaan lapangan kerja di daerah bersangkutan.

Efek derivatif selanjutnya dari pertumbuhan ekonomi daerah dan terbukanya lapangan kerja adalah laju inflasi, dimana besaran inflasi juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha yang berkaitan dengan lapangan kerja tersebut, yang selanjutnya berkontribusi pada nilai PDRB (Sagir: 2008).

Alokasi pendapatan tersebut, selanjutnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya preferensi seseorang untuk melakukan konsumsi dipengaruhi oleh tingkat harga (Inflasi) dan kecenderungan seseorang untuk berinvestasi (*indirect investment*) di bank dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku (Ismail: 2010).

2.1.1 Perdebatan Teori Permintaan Uang & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi

Dalam membahas mengenai perkembangan teori moneter, kita lebih menitikberatkan pada teori moneter mengenai permintaan akan uang karena hal inilah yang merupakan bidang yang sejak awal menjadi kancah perdebatan antara berbagai aliran teori moneter. Terdapat asumsi yang menganggap bahwa uang diterima masyarakat karena uang itu dibuat dari barang-barang berharga ataupun karena uang itu dapat ditukarkan secara bebas dengan barang-barang berharga tadi. Inilah yang menjadi dasar perkembangan kelompok "*Commodity Theory*" (Budiono: 1981).

Sementara itu menurut Sagir (2008), uang diterima masyarakat karena setiap orang mengetahui uang itu dapat ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa, dengan kata lain bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi karena uang itu mempunyai kualitas alat pembayaran dalam masyarakat. Pendapat inilah yang menjadi dasar *Quantity Theory* yang disebut "*Pure Quantity Theory*". Dalam *Quantity Theory* ini ada beberapa pandangan yang akan dijelaskan sejak awal perkembangannya.

Ricardo telah memecahkan masalah nilai uang dengan memperhatikan hubungan yang lurus antara jumlah uang dengan harga barang. Dia telah mengambil kesimpulan bahwa jumlah uang dengan nilai uang mempunyai hubungan terbalik. Bila pendapat itu dihubungkan dengan harga maka pendapat Ricardo diatas dapat dinyatakan sebagai berikut: "Bila jumlah uang naik dua kali lipat, hargapun akan naik dua kali lipat, demikian pula sebaliknya". Dengan kata lain teori Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang langsung proporsional terhadap tingkat harga atau tingkat harga langsung proporsional dengan jumlah uang (Budiono: 1981).

Sementara itu, Irving Fisher menyatakan bahwa yang menentukan nilai uang ada 3 faktor yaitu (a) jumlah uang beredar (M), (b) cepatnya peredaran uang (V), dan (c) jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan (Nasution: 2006).

Kaum klasik beranggapan bahwa uang hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, dengan asumsi dalam jangka pendek *velocity of money* adalah tetap, barang-barang dan jasa-jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai *full employment*. Berdasarkan tiga anggapan diatas maka sebenarnya teori Fisher dapat dikatakan "bahwa dalam jangka pendek tingkat harga umum (P) berubah secara proporsional dengan perubahan supply uang (M). Hal ini sama dengan pendapat *Crude Quantity Theori* dari Ricardo (Nasution: 2006).

Baumol-Tobin (1950) mengemukakan bahwa jumlah uang yang dipegang untuk tujuan transaksi bersifat sensitif terhadap tingkat suku bunga. Teori ini menyatakan bahwa uang adalah aset yang didominasi dan menekankan bahwa orang memegang uang tidak seperti aset-aset lainnya untuk melakukan transaksi, namun juga dipengaruhi oleh kecenderungan untuk melakukan spekulasi jika memungkinkan pada tingkat suku bunga tertentu. Seluruh teori ini mengasumsikan bahwa uang mempunyai biaya dari menerima tingkat pengembalian yang rendah dan manfaat yang membuat transaksi lebih aman atau menempatkannya di bank. Yang berarti bahwa, permintaan kredit investasi adalah dampak secara tidak langsung dari adanya kecenderungan masyarakat atau dunia usaha untuk berspekulasi yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku pada suatu bank tertentu.

Oleh karena itu, sektor perbankan harus diarahkan untuk menjaga agar produktivitas di sektor riil tidak terhambat, dengan tetap mendorong peningkatan permintaan kredit investasi, melalui mekanisme penetapan tingkat suku bunga yang rendah. Jika hal itu bisa dicapai, dampak ekonominya akan langsung berimbas pada besarnya nilai PDRB, ketersediaan lapangan kerja dan laju inflasi (Sagir: 2008).

2.1.2 Perdebatan Teori Investasi & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran dengan maksud untuk menambah kapasitas modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Kuncoro : 2007).

Investasi merupakan satu hal penting dalam proses pembangunan, dimana besarnya investasi akan sangat menentukan angka *multiplier* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith: 2006).

Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* juga mengemukakan pentingnya peranan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi dalam jangka panjang. Dalam teori

Keynes, pengeluaran investasi (I) mempengaruhi permintaan agregat, tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat (Budiono: 1981).

Dasar teoritis lain yang banyak dijadikan rujukan, baik para peneliti maupun birokrasi pemerintahan adalah teori Harrod-Domar. Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan, dan proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return scale*), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Sicat: 1991).

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisa dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila tingkat pertumbuhan output (*growth*), adalah pengaruh proporsional dari tingkat pertumbuhan modal (*capital*) dan pertumbuhan angkatan kerja (Sicat: 1991).

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh *velocity of money*.

Harrod- Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang (Sicat: 1991).

Sementara itu Budiono (2001), bahwa untuk menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter sangat diperlukan campur tangan pemerintah melalui penetapan mekanisme tingkat suku bunga dan berbagai bentuk kebijakan moneter lainnya, khususnya untuk mendorong permintaan kredit investasi agar pertumbuhan ekonomi (sektor riil) tidak terhambat.

2.1.3 Perdebatan Konsep PDRB & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit investasi.

Perdebatan mengenai PDB/PDRB sebagai ukuran keberhasilan kinerja ekonomi suatu negara atau daerah, menempati posisi puncak pada perkembangan ilmu ekonomi terkini. Ketika para pengambil kebijakan masih terus mengacu pada asumsi klasik bahwa peningkatan kesejahteraan hanya akan bisa tercapai dengan terlebih dahulu mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan dan peningkatan gas emisi yang ditimbulkan karena dilakukan eksploitasi secara habis-habisan.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang (Budiono: 1981).

Sementara itu, laporan terbaru komisi pengukuran kinerja ekonomi dan kemajuan sosial yang dibentuk oleh presiden Perancis Nikolas Sarkozy pada tahun 2009, mengungkapkan bahwa PDB atau PDRB bukan lagi indikator yang tepat untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara, tetapi perlu ditambah dengan indikator keberlanjutan di tengah semakin menipisnya deposit Sumber Daya Alam (SDA) dan degradasi modal sosial karena berbagai

akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan yang menempatkan PDB atau PDRB sebagai target utama pembangunan (Stiglitz: 2009).

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik, perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu, sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah, serta untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, dimana merupakan total nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah (Adisasmita: 2007).

Ada banyak informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembentukan data statistik tentang nilai PDRB, apa lagi di era otonomi daerah atau yang juga dikenal dengan isu desentralisasi. Data dan informasi yang diperlukan antara lain melalui produk domestik regional bruto (PDRB), pendapatan regional bruto, pendapatan regional perkapita dan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, data dan informasi yang disajikan selain merupakan evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, juga akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan konsep strategi dan kebijaksanaan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah maupun secara nasional yang akan dilaksanakan untuk tahun pembangunan selanjutnya.

Dalam menyusun rekapitulasi ekonomi bagi suatu daerah, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) menjadi topik penting untuk mengukur kinerja ekonomi daerah, meskipun dalam penilainya tidak menelusuri lebih jauh pihak-pihak mana saja yang menikmati hasil-hasil pertumbuhan ini, dan inilah yang menjadi tantangan utama pembangunan yakni menjamin pemerataan distribusi pendapatan (Kuncoro: 2007).

PDRB adalah merupakan pendapatan atas faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah atau daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut. Nilai produk domestik regional bruto dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu (a) pendekatan produksi, yakni produk domestik regional bruto merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah, biasanya dalam jangka waktu tertentu yang umumnya satu tahun. (b) Pendekatan pendapatan, yakni jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), serta (c) pendekatan pengeluaran, yaitu merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi, serta ekspor netto (ekspor dikurangi import), biasanya dalam jangka waktu tertentu (Mankiw: 2006).

Sejalan dengan Budiono (1981) yang menyatakan bahwa PDRB adalah seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditas) yang diproduksi pada suatu wilayah domestik regional tanpa memperhatikan pemilikan faktor-faktor produksi pada suatu wilayah domestik/regional tersebut.

PDRB dapat juga dihitung berdasarkan atas dua ukuran, yaitu ukuran atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam satu tahun

dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah cara yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah (Purwanto: 2008).

Untuk memperoleh pengertian tentang pendapatan, maka hal itu harus dilihat dari mana pendapatan tersebut dibentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Karena pendapatan itu sendiri merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh individual, masyarakat, produsen atau perusahaan, daerah, negara dan sebagainya. Sebagai hasil usaha atau kompensasi yang diterima di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi melalui produksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka hasilkan.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula daya beli orang tersebut (*ability to pay*) untuk berbagai jenis transaksi ekonomi, khususnya konsumsi. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya, melalui mekanisme pemungutan pajak untuk memenuhi berbagai pembiayaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Sagir: 2008).

Selain itu juga telah dikemukakan oleh Mankiw (1999), bahwa PDB dan PDRB meringkas aktivitas ekonomi pada suatu negara atau daerah dalam nilai

uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena mengukur pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian pada outputnya, dengan alasan bahwa jumlah keduanya adalah sama karena fakta yang mendasar, bahwa setiap transaksi memiliki penjual dan pembeli, setiap uang yang dikeluarkan seorang pembeli menjadi pendapatan seorang penjual yang lainnya.

Meningkatnya pendapatan sebagai implikasi dari adanya pertumbuhan PDRB pada suatu daerah tertentu, diduga ikut mendorong terjadinya peningkatan permintaan kredit untuk tujuan investasi. Ini disebabkan karena adanya kecenderungan dunia usaha untuk memperluas skala usahanya melalui mekanisme pengajuan kredit investasi pada sektor perbankan. Khususnya untuk kawasan Mamminasata, dugaan itu akan diuji lebih jauh tentang pengaruh PDRB terhadap permintaan kredit investasi sektor perbankan.

2.1.4. Perdebatan Konsep Tingkat Suku Bunga & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi.

Dalam sejarah berdirinya bank sentral di berbagai negara, kebijakan terkait penetapan besarnya tingkat suku bunga, banyak dipengaruhi oleh adanya perdebatan dalam sejarah ilmu ekonomi. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bank adalah institusi moneter yang berperan sebagai media perantara keuangan (*financial Intermediate*) antara unit-unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (*surplus*), dengan kelompok yang membutuhkan pendanaan lebih (*deficit*) untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi ekonominya, baik untuk tujuan konsumsi, kredit investasi dan modal kerja.

Bank layaknya perusahaan komersial yang dalam kegiatan operasionalnya ditujukan memperoleh profit untuk mengcover berbagai

pembiayaan yang muncul dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh profit, maka harus terdapat selisih antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (Budisantoso: 2006).

Dari kegiatan itulah, sebuah bank memperoleh pendapatan utama. Tingkat suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga kredit bervariasi antar bank, tergantung dari manajemen internal dan besarnya BI rate yang ditetapkan oleh Bank sentral sebagai otoritas tunggal kebijakan moneter (UU. No.3 tahun 2004).

Dalam sejarah ilmu ekonomi, terdapat beberapa gagasan yang berkaitan dengan suku bunga suatu bank. Menurut kaum klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam suatu perekonomian, dimana tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) akan selalu sama dengan jumlah yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan investasi. Beranjak dari teori ekonomi mikro, teori klasik mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari penggunaan modal.

Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitusif. Semakin langka modal, akan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga (Nasution: 2001).

Investasi merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, keinginan masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut, yang merupakan biaya untuk penggunaan dana (*Cost of Capital*). Makin rendah suku bunga, maka pengusaha

akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Suku bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya ada dorongan untuk naik atau turun) akan tetapi keinginan masyarakat untuk menabung sama dengan keinginan masyarakat untuk melakukan investasi (Supriono: 2011).

Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik. Permintaan uang tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan transaksi (*transaction motive*), tapi juga untuk tujuan berjaga-jaga (*precautionary motive*) dan untuk maksud spekulasi (*speculation motive*). Tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang dalam pasar uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi PDB/PDRB (Baumol-Tobin:1950).

Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai *full employment*. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat didorong untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional.

Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan bahwa tingkat bunga bersifat normal. Jika memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang.

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas menurun. Dari kedua penjelasan diatas, terdapat hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan uang tunai. Permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya (Baumol-Tobin :1950).

Hicks mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian, bila tingkat bunga ini memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor riil. Pandangan ini merupakan gabungan dari pendapat klasik dan keynesian, dimana mazhab klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif, artinya bahwa bila seseorang memiliki dana maka mereka dapat menambah alat produksinya agar keuntungan yang diperoleh meningkat. Jadi uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. Sedangkan menurut keynesian bahwa uang bisa produktif dengan metode spekulasi di pasar uang, dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Adanya keuntungan inilah sehingga orang ingin meminjam uang dan bersedia membayar bunga.

Dari beberapa konsep tentang tingkat bunga diatas, maka dapat kita hubungkan antara tingkat suku bunga tabungan dengan tingkat bunga kredit, dimana sektor perbankan menghimpun dana melalui giro, deposito, dan tabungan lalu disalurkan melalui berbagai fasilitas kredit. Jelaslah bahwa penawaran kredit perbankan ditentukan oleh adanya akumulasi modal dalam bentuk deposito dan tabungan, sebagai sumber dana perbankan dalam menyalurkan kredit.

Adanya tabungan masyarakat tidaklah berarti dana hilang dari peredaran, tetapi dipinjam / dipakai oleh pengusaha untuk membiayai investasi. Penabung mendapatkan bunga atas tabungannya, sedangkan pengusaha bersedia membayar bunga tersebut selama ekspektasi keuntungan yang diperoleh dari investasi lebih besar dari bunga tersebut. Adanya kesamaan antara tabungan dengan investasi adalah sebagai akibat bekerjanya mekanisme tingkat bunga. Tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga mempengaruhi keinginan untuk menabung dari masyarakat. Besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank juga dipengaruhi oleh besarnya *Cost Of Money* (Supryono: 2011).

Tingkat bunga kredit yang ditetapkan untuk seluruh nasabah (Debitur) harus lebih besar dari jumlah bunga simpanan dari kreditur (*Cost Of Money*) dan biaya operasionalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap permintaan kredit investasi oleh karena merupakan biaya bagi penggunaan dana kredit tersebut.

2.1.5. Perdebatan Konsep Laju inflasi & Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Investasi.

Inflasi di Indonesia diumpamakan seperti penyakit endemis dan berakar dalam sejarah perekonomian Indonesia. Inflasi di Indonesia sangat tinggi di zaman Presiden Soekarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak *prudent* ("kalau perlu uang, cetak saja"). Di zaman Soeharto, pemerintah berusaha menekan inflasi akan tetapi tidak bisa di bawah 10 persen pertahun. Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai *agent of development*, yang bisa mengucurkan kredit likuiditas tanpa batas. Baru di era reformasi mulai di masa pemerintahan Presiden Habibie maka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan

karena *inflationary expectations* masyarakat (yang bertolak ke belakang, artinya bercermin kepada sejarah) maka “inflasi inti” masih lebih besar daripada 5 persen setahun (Abimanyu: 2008).

Cukup banyak definisi inflasi tetapi hingga kini belum diperoleh suatu definisi yang baku yang disetujui oleh seluruh ahli ekonomi. Definisi inflasi menurut beberapa penulis pada dasarnya sama yaitu antara lain : Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus pada suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu (Boediono: 2001).

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan yang pasti terdapat kenaikan secara umum pada harga barang secara terus-menerus dalam satu periode (Nopirin: 2000).

Samuelson dan Nordhaus (1998: 578-603), mendefinisikan Inflasi sebagai kenaikan harga secara umum. Jadi tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum pada suatu Negara atau daerah pada periode waktu tertentu.

Sementara Keynes (1936), Inflasi merupakan indikasi bahwa masyarakat dalam suatu perekonomian berusaha memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, sehingga melebihi kapasitas perekonomian tersebut untuk memenuhi tingginya permintaan konsumsi.

Secara teoritik, tingginya permintaan untuk tujuan konsumsi merupakan dampak dari peningkatan jumlah uang beredar (JUB) dalam masyarakat. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya peningkatan kemampuan individu atau kelompok yang dikontribusi oleh permintaan kredit perbankan. (Triandaru: 2006).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa ada stabilitas ekonomi, perekonomian akan bekerja secara tidak efisien. Dalam kondisi ada inflasi yang tinggi, jelas investasi akan menurun, bahkan kegiatan investasi akan berubah menjadi spekulasi, produksi berkurang dan sangat besar kemungkinannya diikuti oleh gejolak sosial dan politik yang tidak menguntungkan. Jadi kestabilan suatu perekonomian sangat penting dijaga.

Stabilitas ekonomi akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga pembangunan ekonomi selanjutnya akan menjadi semakin mantap. Sebelum kebijakan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu diketahui penggolongan atau kategori apa inflasi yang sedang dihadapi, dan penggolongan mana yang dipilih (Sagir: 2008).

Budiono (2001) menggolongan menurut parah tidaknya inflasi, dapat dibedakan yakni inflasi ringan (dibawah 10% pertahun), inflasi sedang (antara 10 – 30% pertahun), inflasi berat (antara 30 –100%), dan hiperinflasi diatas 100% pertahun.

Menurut sebab musababnya, secara umum inflasi dapat dibagi kedalam dua golongan yakni *Pertama*, Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang tertentu kuat (*demand inflation*) yaitu inflasi yang timbul akibat adanya banyak permintaan akan barang-barang konsumsi oleh masyarakat, karena permintaan masyarakat bertambah secara agregat (*agregat demand*). *Kedua*, inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*), yaitu inflasi yang timbul karena tingginya biaya produksi dan menurunnya produktivitas sektor riil akibat rendahnya produktivitas (Sagir: 2008).

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi

pada pengusaha besar). Namun demikian, jika inflasi tidak terkendali (*hiperinflasi*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau melakukan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.

Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sagir: 2008).

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas tingkat suku bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Implikasinya, pada saat nilai tabungan rendah, maka nilai kredit perbankan juga akan rendah karena akumulasi tabungan yang selanjutnya disalurkan menjadi kredit akan kecil jumlahnya (Triandaru: 2006).

Dari uraian tersebut di atas, nampak jelas bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada bank konvensional adalah PDRB, tingkat suku bunga dan laju inflasi. Penelitian bermaksud mengidentifikasi lebih jauh, pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap permintaan kredit pada sektor perbankan di kawasan Metropolitan Mamminasata untuk Periode 2000-2011.

2.2. Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian ini, berikut akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dimana pokok pembahasan sangat relevan dengan apa yang menjadi topik penelitian penulis.

Dengan pertimbangan kemudahan penelitian ini maka penulis mengambil acuan dari penelitian terdahulu. Yusuf (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah di Sumatera Utara*" menemukan fakta bahwa PDRB dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap permintaan kredit konsumtif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PDRB dan Inflasi berpengaruh secara positif terhadap permintaan kredit, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh secara negatif.

Hadi, Andayani (2008), dengan judul *Analisis Permintaan Kredit konsumsi pada perbankan di Sumatera Selatan*, diimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan model probabilita permintaan kredit konsumsi yang diestimasi dengan model regresi berganda dengan metode *ordinary least squares (OLS)* memberikan hasil baik. Penelitian ini memberikan hasil bahwa, faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi permintaan kredit konsumsi di Sumatera Utara ialah PDRB, tingkat bunga kredit, kurs rupiah terhadap dollar, dan permintaan kredit konsumsi pada periode sebelumnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dampak paling tinggi terhadap permintaan kredit konsumsi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan diikuti oleh permintaan kredit pada tahun sebelumnya, kurs dan tingkat suku bunga.

Rifai (2007) dengan judul: "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah (Periode 1990 – 2005)*". Hasil analisis yang diperoleh, juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank

Umum di Propinsi Jawa Tengah, suku bunga riil kredit perbankan berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah. Secara bersama-sama, variabel independen yakni PDRB, tingkat suku bunga riil kredit perbankan, dan laju inflasi serta dummy variabel krisis ekonomi memberikan pengaruh nyata dan signifikan terhadap variable dependen yaitu permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah.

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan studi empiris tersebut diatas sebagai berikut :

Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
<p>1. <i>Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah di Sumatera Utara.</i> Muhammad Yusuf (2009)</p>	<p>Regresi berganda dengan metode <i>ordinary least squares (OLS)</i></p>	<p>menemukan fakta bahwa PDRB dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap permintan kredit konsumtif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PDRB dan Inflasi berpengaruh secara positif terhadap permintaan kredit, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh secara negatif</p>
<p>2. judul <i>Analisis Permintaan Kredit konsumsi pada perbankan di Sumatera Selatan.</i> Andayani Hadi (2008)</p>	<p>regresi berganda dengan metode <i>ordinary least</i></p>	<p>faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi permintaan kredit konsumsi di Sumatera Utara ialah PDRB, tingkat bunga kredit, kurs rupiah terhadap dollar, dan</p>

	<i>squares</i> (OLS)	permintaan kredit konsumsi pada periode sebelumnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dampak paling tinggi terhadap permintaan kredit konsumsi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan diikuti oleh permintaan kredit pada tahun sebelumnya, kurs dan tingkat suku bunga.
3. <i>“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah (Periode 1990 – 2005)”</i> . Muhammad F. Rifai (2007)	regresi berganda dengan metode <i>ordinary least squares</i> (OLS)	Secara bersama-sama, variabel independen yakni PDRB, tingkat suku bunga riil kredit perbankan, dan laju inflasi serta dummy variabel krisis ekonomi memberikan pengaruh nyata dan signifikan terhadap variable dependen yaitu permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah.

2.3. Kerangka Pikir

Hakikat setiap teori dalam ilmu ekonomi yang diterapkan dalam tema besar pembangunan ekonomi, adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan secara teoritis, kita mengenal bahwa kesejahteraan hanya akan tercipta dengan pertama-tama harus terjadi pertumbuhan ekonomi sebagai syarat utama, baik di tingkat nasional (Negara) maupun pada tingkat regional. Karena presposisi tersebut, maka variabel PDRB sangat penting dalam mengukur keberhasilan ekonomi suatu negara atau daerah.

PDRB adalah merupakan pendapatan atas faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah atau daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut. Dengan kata lain, seseorang atau suatu badan usaha hanya akan memperoleh pendapatan, apabila sumber daya ekonomi yang dimilikinya, baik tenaga kerja maupun modal finansial dapat berkontribusi pada proses produksi yang nantinya akan tercermin dalam PDRB suatu daerah (Suparmoko: 2002).

Pertumbuhan suatu bank merupakan korelasi positif dengan pertumbuhan kredit pada bank tersebut, bahkan hal ini menjadi faktor kunci. Sebagai badan usaha yang menjalankan operasinya dengan berorientasi pada laba (*profit oriented*), bank harus menerapkan selisih antara suku bunga simpanan, baik berupa tabungan, giro maupun deposito, dengan suku bunga pinjaman, baik untuk tujuan konsumsi, investasi dan modal kerja. Tingkat suku bunga untuk setiap bank berbeda, tergantung dari keputusan internal manajemen bank tersebut dan sejauhmana kepatuhannya terhadap suku bunga SBI (*BI rate*) sebagai acuan bagi perbankan (UU No. 3 Tahun 2004).

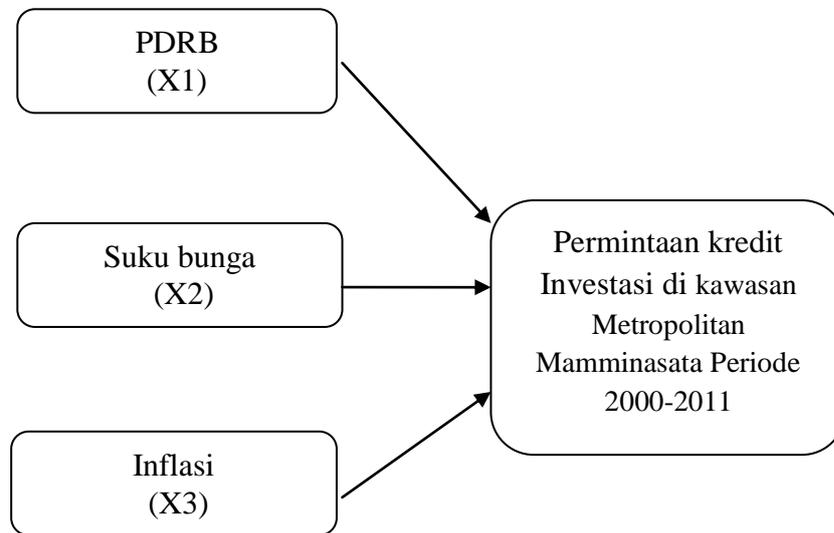
Tingkat suku bunga menjadi variabel penting yang mempengaruhi preferensi seorang nasabah untuk memutuskan mengambil kredit pada bank

tertentu. Selanjutnya, tingkat suku bunga juga memiliki pengaruh terhadap laju inflasi, baik untuk skala nasional maupun regional. Secara umum, laju inflasi khususnya untuk tingkat regional, ikut menentukan apakah seorang nasabah akan mengambil kredit pada suatu bank, ataukah memilih untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya pada *instrument* lain yang lebih menguntungkan, atau bahkan boleh jadi langsung dibelanjakan untuk menambah barang modal untuk menambah kapasitas usahanya.

Selanjutnya, investasi yang terbentuk baik investasi langsung di sektor riil maupun melalui mekanisme *financial intermediate* perbankan akan berimplikasi pada besaran inflasi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan mempengaruhi nilai total PDRB dan pendapatan, baik itu pendapatan individu maupun badan usaha, bahkan negara sekalipun.

Sebagai kesatuan daerah yang tengah mengalami proses aglomerasi wilayah, kawasan strategis nasional Mamminasata sangat memerlukan pentingnya dukungan dan peranan perbankan dalam hal penyaluran kredit untuk berbagai kebutuhan investasi di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, maka akan dilakukan pengujian lebih dalam tentang pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, yakni PDRB, tingkat suku bunga dan laju inflasi terhadap permintaan kredit investasi di kawasan metropolitan Mamminasata untuk periode 2000-2011.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.3 Alur kerangka pikir penelitian

2.4. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir dari penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- Diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit investasi, sementara tingkat suku bunga, dan laju inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit investasi pada perbankan di kawasan metropolitan Mamminasata pada periode tahun 2000-2011.